

MEMBANGUN BUDAYA DEMOKRASI DI SEKOLAH MELALUI *JURISPRUDENTIAL INQUIRY*

Muhammad Japar, Dini Nur Fadhillah, Yuyus Kardiman, Yasnita, dan Sarkadi

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta

email: mjapar@unj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengembangkan budaya demokrasi di Sekolah Menengah Atas melalui *jurisprudential inquiry*. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengamati penanaman nilai-nilai demokrasi yang diterapkan dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan menerapkan model pembelajaran *jurisprudential inquiry*. Model pembelajaran *jurisprudential inquiry* secara empirik telah membangun atmosfer pembelajaran yang dinamis. Model ini memberikan peluang bagi siswa untuk berbeda pendapat tetapi berdasarkan data yang akurat dan tidak perlu malu atau rendah diri untuk mengakui bahwa pendapat siswa yang lain itu lebih baik dan rela mendukung pendapat itu. Dengan demikian, model ini memungkinkan terjadinya perdebatan yang konstruktif. Praktik ini mampu membangun nilai menghargai perbedaan pendapat dalam proses pembelajaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran *jurisprudential inquiry* dapat menjadi model alternatif dalam mengembangkan budaya demokrasi yaitu berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, menghargai keragaman, membiasakan musyawarah, dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban di sekolah.

Keywords: *budaya demokrasi, jurisprudential inquiry, sekolah menengah atas*

BUILDING DEMOCRACY OF CULTURE IN SCHOOL THROUGH JURISPRUDENTIAL INQUIRY

Abstract

This study was aimed at developing democratic culture in high schools through Jurisprudential Inquiry. The study used a descriptive qualitative approach by observing the planting of democratic values applied in the subjects of Citizenship Education by applying the jurisprudential inquiry learning model. The jurisprudential inquiry learning model empirically had built a dynamic learning atmosphere. This model provided opportunities for students to disagree but based on the accurate data and no need to be ashamed or inferior to acknowledge that the opinions of other students were better and they were willing to support that opinion. Thus, this model allows constructive debate. This practice was able to build values of respect for differences of opinion in the learning process. The results show that the jurisprudential inquiry learning model can be an alternative model in developing a democratic culture. Democratic values applied were actively participating in school activities, respecting diversity, familiarizing deliberations, and maintaining a balance between rights and obligations in school.

Keywords: *democracy culture, jurisprudential inquiry, senior high school*

PENDAHULUAN

Di era millenial saat ini, demokrasi mengalami kemunduran dengan munculnya kasus yang menyangkut mengenai suku, agama, ras dan antargolongan dalam pemilihan kepala daerah. Kasus-kasus mengenai intoleransi bermunculan salah satunya adalah kasus penyerangan tokoh agama yang akan menimbulkan isu Sara. Maraknya kekerasan terhadap identitas agama, suku dan orientasi seksual merupakan pertanda betapa tidak tanggapnya negara dalam mengembangkan masyarakat yang pluralistik. Menerima keberagaman adalah salah satu budaya demokratis (Agusta, 2013, p. 19).

Sebagai negara yang memiliki beragam etnik, bahasa, agama, budaya serta kelompok sosial lainnya memiliki tantangan tersendiri. Tantangan bangsa Indonesia adalah mempertahankan Bhineka Tunggal Ika ke dalam masyarakat yang demokratis. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Secara tegas Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi. Untuk membentuk warga negara yang demokratis, memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil dan berkeadilan maka diperlukan pendidikan.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tertulis bahwa pendidikan wajib memegang beberapa prinsip yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemik dengan sistem yang terbuka dan multimakna. Demokrasi

tidak akan datang, tumbuh dan berkembang dengan sendirinya melainkan dibutuhkan keserasian institusi demokrasi dan perilaku demokrasi. Bentuk masyarakat demokrasi akan tumbuh kokoh jika di kalangan masyarakat tumbuh kultur dan nilai-nilai demokrasi. Untuk itu diperlukan budaya demokrasi di sekolah sebagai tempat strategis dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi yang aktivitas atau perbuatannya sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Pendidikan dewasa ini harus bisa berfungsi untuk ikut membangun kapasitas bangsa sebagai manusia pembelajar, sehingga mampu dan percaya diri dalam percaturan global di era millenial saat ini. Pendidikan yang demokratis merupakan sistem andragogi. Sistem ini menuntut keaktifan siswa untuk berbuat *learning by doing*. Proses pendidikan yang menekankan pentingnya nilai-nilai kebebasan dan demokrasi inilah yang menjadikan pendidikan bernuansa humanis. Karena kebebasan menimbulkan kreativitas. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penelitian sebelumnya mengenai pengaruh penerapan budaya demokrasi di lingkungan sekolah terhadap pembentukan *civic skill* (Fatarina, Holilulloh, & Adha, 2014).

Terdapat pengaruh antara pelaksanaan program, target kelompok, dan *responsibility*. Saling bersinergi satu sama lain membentuk budaya demokrasi di lingkungan sekolah. Dengan kata lain, pelaksanaan program menjadi pedoman pencapaian target kelompok yang dalam pelaksanaannya akan dipertanggungjawabkan oleh seluruh komponen sekolah meliputi guru dan siswa untuk mewujudkan pembentukan *civic skills*. Adanya keyakinan tertentu tentang pendidikan, prestasi, dan disiplin sudah membentuk sebuah sistem budaya unggul di sekolah. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Sisdiknas) juga menyebutkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan proses yang dilakukan oleh pendidik untuk memberikan materi pelajaran kepada peserta didik yang nantinya peserta didik dapat mempelajari lingkungan tertentu dan akhirnya mengalami perubahan tingkah laku. Satuan pendidikan sudah seharusnya menyelenggarakan pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik (Mulyasana, 2012, p. 155). Untuk memulai pembelajaran diperlukan perencanaan sebagai proses penyusunan materi. Budaya yang ada di sekolah pun sudah seharusnya meliputi prestasi dan keyakinan tentang disiplin. Komponen budaya ini juga dapat dikembangkan melalui pembelajaran.

Mayoritas siswa menganggap pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang sulit karena harus menghafal sistem ketatanegaraan yang rumit (Prihandoko, Slamet, & Winarno, 2017). Namun, di dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terdapat materi budaya demokrasi yang tidak hanya dihafal melainkan siswa diharapkan untuk dapat mengaplikasikan budaya demokrasi tersebut.

Demokrasi memiliki makna mendalam jika dijelaskan oleh Abraham Lincoln yaitu *democracy is government of the people, by the people, and for the people* (Kardiman, 2016, p. 49). Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Untuk itu, rakyat diberikan pendidikan mengenai demokrasi melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pentingnya mata pelajaran ini karena sesuai Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (2) untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Model pembelajaran merupakan suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas (Trianto, 2007, p. 51). Pemilihan model pembelajaran ini dilatarbelakangi oleh hasil penelitian Japar (2017), *jurisprudential knquiry* sebagai model pembelajaran alternatif untuk Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas (SMA). SMA merupakan salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTS atau bentuk lain yang sederajat (pasal 1 ayat (1) RPP DIKDASMEN). Ianun (2007, p. 19-20) menuliskan karakteristik siswa SMA umur 16-18 tahun. UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37 juga mewajibkan kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan, dan muatan lokal.

Berdasarkan karakteristik siswa SMA senang dengan perkembangan sosial, sadar, dan peka. Dalam belajar mandiri, siswa belajar tanpa intervensi guru, siswa secara kritis dan kreatif belajar dengan mengamati, menganalisis, dan *sharing*. Siswa melakukan interaksi sosial berupa toleransi, saling menghormati, dan menerima ide dan kritik, serta kerja sama menciptakan relasi *sharing* dengan siswa lain. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan dan karakteristik siswa SMA membuat *jurisprudential inquiry* juga menunjukkan bahwa dengan model pembelajaran tersebut guru dan siswa

dapat memahami baik teori mengenai demokrasi maupun implementasi budaya demokrasi di sekolah. Namun, tema yang diangkat lebih mencerminkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Penjelasan di atas menguatkan penulis secara konseptual untuk membangun budaya demokrasi di sekolah melalui *jurisprudential inquiry*. Pengembangan ke-pribadian siswa yang beragam menjadikan sekolah sebagai pondasi untuk membekali siswa dengan nilai-nilai positif agar menghargai perbedaan. Sekolah dapat menyelenggarakan pendidikan demokrasi yang dapat dijadikan sebagai upaya strategis pendidikan demokrasi bangsa Indonesia khususnya generasi muda.

Menciptakan budaya demokrasi di sekolah harus didukung oleh semua warga sekolah. Dalam penelitian ini, budaya demokrasi dibangun melalui pembelajaran berbasis *jurisprudential inquiry* dengan memberikan materi sistem dan dinamika demokrasi Indonesia yang dapat merangsang refleksi kritis siswa dalam membangun budaya demokrasi berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, menghargai keragaman, membiasakan musyawarah dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban di sekolah.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2014, p. 283). Pendekatan kualitatif digunakan karena permasalahan yang dikaji peneliti dalam penelitian ini membutuhkan data-data lapangan yang aktual dan kontekstual. Penelitian

kualitatif dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran teoritis yang membentuk atau mempengaruhi studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau manusia.

Creswell (2010, p. 15) menjelaskan langkah-langkah analisis data yang dilakukan untuk mengolah data dari teknik deskriptif kualitatif. Langkah-langkah tersebut yaitu mempersiapkan dan mengorganisasikan data untuk dianalisis, mengeksplorasi data, menganalisis data melalui koding, menerapkan proses koding untuk mendeskripsi, menunjukkan deksripsi dan memvalidasi keakuratan hasil penelitian. Dari kesimpulan di atas peneliti akan meneliti mengenai nilai-nilai demokrasi yang dapat mengembangkan budaya demokrasi terhadap siswa di SMA Labschool Jakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipatif.

Observasi yang digunakan adalah partisipasi aktif. Dalam hal ini peneliti ikut terlibat dalam kegiatan. Melalui observasi di lapangan, peneliti mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial sehingga akan mendapatkan pandangan yang holistik atau menyeluruh. Kegiatan yang diobservasi yaitu proses pembelajaran melalui *jurisprudential inquiry* Observasi pada guru dilakukan aktivitas kegiatan awal, kegiatan isi, dan kegiatan penutup.

Data juga dikumpulkan melalui wawancara terstruktur. Objek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 2 dan IPS 2 serta guru PKn SMA Labschool Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan strategi pembelajaran *jurisprudential inquiry*. Strategi Pembelajaran model *jurisprudential inquiry* dilakukan dengan enam tahapan (Joyce, 2003, p.

74) yaitu melakukan orientasi kasus lalu; mengidentifikasi isu dalam kasus; mengambil posisi terhadap kasus; menjelajahi argumen yang mendasari posisi yang diambil, menetapkan posisi pilihan, dan kualifikasi; dan pengujian argumen dengan fakta-fakta, definisi, dan konsekuensi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi, tahap *pertama* yang harus dilakukan adalah yaitu memperkenalkan materi dan mengarahkan siswa pada kasus di kelas XI IPA 2 dan IPS 2. Setelah merasa cukup memberi penjelasan materi dan memperkenalkan kasus. Tahap *kedua*, mengidentifikasi. Tahap *ketiga*, memilih posisi. Kasus yang harus dianalisis yaitu mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik atau masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya. Pada tahap ini siswa diberikan kebebasan untuk memilih posisi pro maupun kontra. Dari 38 siswa di kelas XI IPA 2, 24 di antaranya memilih kontra dan 14 lainnya memilih pro.

Kelompok pro adalah kelompok yang setuju bahwa pelaksanaan di Indonesia sudah berjalan dengan baik, sedangkan kelompok kontra adalah kelompok yang setuju bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia jauh dari kondisi ideal. Kelompok pro dan kelompok kontra akan terbentuk dengan sendirinya ketika siswa sudah memilih posisi dan mengemukakan pendapat mengenai alasan memilih posisi tersebut.

Pada tahap *ketiga* ini, siswa mengemukakan pendapat mengenai alasan memilih pro maupun kontra. Setelah semua siswa mengemukakan pendapat dan menentukan posisinya, baik yang pro maupun kontra, guru menutup pembelajaran dengan memberikan tugas untuk mempersiapkan

paper dan *slide* untuk dipresentasikan oleh masing-masing kelompok pada pertemuan berikutnya. Masing-masing kelompok harus mempersiapkan yel-yel kelompok dan memperkuat argumen dengan teori-teori dan fakta yang harus mereka gali dari berbagai sumber informasi baik buku paket PKn, LKS, maupun internet.

Pada pertemuan kedua, siswa lebih bersemangat dan mulai mengerti bagaimana pelaksanaan model *jurisprudential inquiry*. Guru membuka pembelajaran dengan mempersilahkan siswa duduk berdasarkan kelompok masing-masing dan mempersilahkan masing-masing kelompok pro dan kontra untuk menampilkan yel-yel mereka terlebih dahulu. Sebelum guru melakukan tahap keempat, guru terlebih dulu menjelaskan kembali bagaimana penerapan tahap empat sampai tahap enam yang akan mereka lakukan. Suasana kelas terlihat lebih komunikatif.

Setelah itu, guru langsung melakukan tahap ke empat yaitu mengeksplorasi sikap atau pendirian serta bentuk argumentasi siswa masing-masing kelompok. Pada tahap ini guru mempersilahkan masing-masing kelompok untuk presentasi. Kedua kelompok sama-sama melakukan persiapan yang cukup baik untuk presentasi kelompok mereka. Baik kelompok pro maupun kontra, keduanya menyiapkan tampilan slide sesuai permintaan guru. Pada tahap ke empat ini, guru memainkan peran ala Socrates yaitu memperdebatkan pendapat yang dikemukakan siswa dengan pendapat-pendapat konfrontatif.

Hampir seluruh siswa di kelas XI IPA 2 dan IPS 2 berani untuk memberikan pendapatnya ketika proses diskusi dan tanya jawab berlangsung. Ada yang takut untuk berpendapat dan ada sebagian siswa yang mengaku *nervous*. Langkah ke lima yaitu menegaskan dan mengkualifikasi posisi. Pada pertemuan ke dua ini siswa

masih terlihat ada yang mendominasi. Siswa yang aktif sangat terlihat aktif dan siswa yang pasif lebih bersemangat dalam memberikan pendapatnya meskipun ada perasaan malu. Saat menegaskan posisi masing-masing kelompok jubah masing-masing kelompok mengemukakan pendapat dengan tegas. Dari 38 siswa hanya ada 10 siswa yang pasif dan menjadi pendengar. Setelah langkah ke lima dilakukan, maka dilanjutkan dengan langkah ke enam, yaitu menguji asumsi faktual di balik posisi yang sudah *qualified*. Guru mendiskusikan argumen-argumen siswa yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat posisi tersebut relevan atau tidak.

Wawancara terstruktur mengenai budaya demokrasi di sekolah melalui *jurisprudential inquiry* juga dilakukan di luar jam pelajaran. Berdasarkan hasil wawancara, siswa merasa bahwa budaya demokrasi dapat dilakukan melalui hal-hal kecil yang ada di lingkungan kelas terlebih dahulu. Materi demokrasi yang diberikan bukan sekedar menghafal. Siswa diajak untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran *jurisprudential inquiry* membantu dalam menerapkan budaya demokrasi di kelas.

Melalui budaya demokrasi yang ditunjukkan di Kelas XI IPA 2 dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, terlihat bahwa hampir seluruh siswa berpartisipasi aktif. Hal tersebut dapat terlihat dari siswa yang semangat untuk memberikan penjelasannya terkait memilih pro maupun kontra. Pemahaman teori mengenai demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan sudah seharusnya diimplementasikan siswa terutama di lingkungan sekolah. Siswa diberikan pemahaman mengenai kriteria menentukan situasi demokrasi seperti kekuasaan, keadilan, kesejahteraan, peradaban, afeksi,

keamanan dan kebebasan. Mereka dilatih untuk ikut dalam menentukan isu yang berhubungan dengan kriteria demokrasi tersebut. Kelas XI IPS 2 tidak jauh berbeda dengan kelas sebelumnya. Pada saat menggunakan *jurisprudential inquiry*, siswa masih merasa bingung karena bisa bertukar posisi. Pro menjadi kontra maupun sebaliknya.

Budaya demokrasi menghargai perbedaan ini yang diajarkan juga melalui *jurisprudential inquiry*. Pengaruh yang cukup kuat ini menggambarkan bahwa pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pengembangan kemelek wacanaan warga dapat dikatakan cukup berhasil. Sekolah-sekolah harus meletakkan dasar-dasar yang positif, partisipatif dengan dua cara yang penting yakni membantu siswa memperoleh dan memahami informasi penting dan memberikan kesempatan dan dorongan kepada mereka untuk berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan sekolah. Guru tidak hanya memberikan ceramah melainkan memancing siswa untuk ikut berpartisipasi di dalam kelas. Membuka dialog mengenai kasus dan memberikan pendapat yang sesuai dengan kasus yang diangkat mengajarkan siswa untuk berani dan berpikir kritis.

Budaya demokrasi di SMA Labschool Jakarta juga dapat terlihat di luar kelas dengan adanya implementasi mengenai demokrasi yaitu siswa ikut serta dalam pemilihan Ketua OSIS. Siswa yang memberanikan diri untuk menjadi Ketua OSIS juga mendorong demokrasi yang sehat. Siswa belajar untuk berpartisipasi di lingkungan sekolah yang kemudian dapat berkembang ketika berada di lingkungan sosialnya. SMA Labschool Jakarta menunjukkan adanya wujud nyata partisipasi aktif dalam memilih ketua OSIS. Sebagai siswa mereka memiliki hak untuk memilih pemimpinnya di sekolah.

Mereka memilih sesuai dengan keinginan dan tanpa paksaan.

Pemilihan ketua di dalam kelas juga patut dihargai sebagai wujud budaya demokrasi. Dalam proses pemilihan ketua Kelas di XI IPA 2 dan IPS 2 juga mengembangkan budaya demokrasi langsung. Seluruh siswa ikut dalam proses pengambilan keputusan. Siswa yang memiliki keberanian dan siap bertanggung jawab terhadap kelasnya juga diberikan kebebasan untuk menjadi ketua kelas. Di Kelas XI IPA 2 maupun IPS 2 tidak ada paksaan untuk menunjuk ketua kelas. Budaya demokrasi adalah budaya seseorang secara bebas memilih calon pemimpin tanpa paksaan dari orang lain. Hal tersebut dapat dilakukan dalam pemilihan Ketua OSIS di sekolah. Siswa Kelas XI IPA 2 dan IPS 2 memberikan penjelasan mengenai pemahaman budaya demokrasi, budaya demokrasi bukan sekedar nilai-nilai yang tertulis saja tetapi juga harus di aplikasikan.

Budaya demokrasi juga dapat dibangun melalui proses pembelajaran sehingga guru tidak hanya berceramah tetapi ikut mendengarkan setiap pendapat siswa tanpa adanya diskriminasi dan tekanan untuk mendapatkan nilai yang sempurna. Misi pendidikan kewarganegaraan (Sapriya & Winataputa, 2004, p. 2-3) adalah mengembangkan pendidikan demokrasi yang mengemban tiga fungsi pokok, yakni kecerdasan warga negara (*civic intelligence*), membina tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*), dan mendorong partisipasi warga negara (*civic participation*). Fungsi pokok ini dibantu dengan model pembelajaran yang sesuai dengan budaya demokrasi.

Siswa XI IPA 2 juga menambahkan bahwa *jurisprudential inquiry* merupakan model pembelajaran yang sesuai dengan budaya demokrasi. Mereka merasakan

ketika melakukan tahap argumentasi siswa berusaha untuk bersikap logis dan rasional. Kebebasan dalam berpendapat serta dapat memilih baik pro maupun kontra dilakukan tanpa paksaan. Siswa diajak untuk dapat mengeksplorasi setiap kasus agar nantinya siswa dapat menentukan pilihan tanpa ada intervensi dari manapun. Siswa menunjukkan sikapnya dalam mempertahankan argumennya. Siswa juga dilatih untuk berfikir kritis dan peduli sehingga mereka memahami haknya sebagai siswa tanggung jawabnya di kelas dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Siswa Kelas XI IPA 2 dan IPS 2 memiliki kewajiban untuk mengikuti peraturan yang ada di kelas. Ketika siswa sudah mampu mempertahankan argumentasi dan dapat memberikan alasannya, guru menguji argumentasi yang digunakan untuk mendukung sikap relevan dan valid. Materi demokrasi yang diberikan di kelas menjadi ringan dengan model pembelajaran *jurisprudential inquiry*. Materi ini dapat dipahami dan diaplikasikan siswa terutama di lingkungan sekolah.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada guru PKn di SMA Labschool Jakarta yang mengaplikasikan model pembelajaran *jurisprudential inquiry* menunjukkan materi demokrasi memberikan kemudahan dalam mengembangkan budaya demokrasi. Terdapat ciri-ciri demokrasi yang dapat dipelajari oleh siswa seperti menyelesaikan perselisihan dengan damai. Materi yang diberikan melalui *jurisprudential inquiry* dapat membantu siswa memahami hak dan tanggung jawab sebagai warga negara dan siswa di sekolah.

Debat ala Socrates yang dilakukan melatih siswa untuk membatasi tingkat emosional dalam melakukan argumentasi. Debat tersebut dapat melihat kemampuan siswa mengeksplorasi pengetahuan mereka. Guru juga menyarankan agar

siswa diharuskan menjauhi SARA dalam memberikan argumennya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada siswa Kelas XI IPA 2 dan IPS 2 mengenai pemahaman budaya demokrasi hampir keseluruhan mengetahui mengenai budaya demokrasi, siswa mampu menuliskan dan menyebutkan nilai-nilai demokrasi. Selama proses pembelajaran siswa diberikan kesempatan oleh guru untuk menyampaikan gagasan di kelas.

Berdasarkan hasil temuan di atas menunjukkan bahwa dengan model pembelajaran *jurisprudential inquiry* siswa diberikan kebebasan untuk memilih posisi mereka baik pro maupun kontra terhadap kasus yang diberikan. Siswa tidak mendapatkan paksaan dalam menentukan sikap terhadap kasus yang diangkat. Ada beberapa siswa yang memutuskan sikapnya untuk berada di posisi pro kemudian pindah ke posisi kontra. Perpindahan siswa-siswa ini memiliki alasan. Jika argumen kuat, logis, dan rasional, siswa mampu mempertahankan sikap. Namun, jika argumen tidak kuat hasilnya pun sebaliknya.

Siswa kelas XI IPS 2 yang memilih kontra harus menerima keputusan siswa lainnya jika memilih pro. Siswa diajak untuk ikut partisipatif dalam setiap proses pembelajaran. Di kelas XI IPA 2, guru memberikan kesempatan siswa untuk membantu dalam proses pembelajaran terlebih dahulu seperti berdoa, dan mempersiapkan perangkat pembelajaran.

Berdasarkan hasil temuan di kelas, tidak ada perbedaan guru dalam mengajar baik di kelas XI IPA 2 atau IPS 2. Setelah hasil pengujian asumsi di balik posisi yang dianggap memenuhi kualifikasi siswa diberitahukan bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban baik sebagai warga negara, siswa maupun anak. Salah satu hak siswa adalah mendapatkan pengajaran sehingga mereka memiliki kewajiban

untuk belajar yang baik dan benar. Guru juga memberikan pemahaman terhadap siswa bahwa mereka berkewajiban untuk tetap fokus selama jam pelajaran dengan tidak mengganggu teman sekitar dan tidak merendahkan argumentasi ataupun pendapat orang lain.

Sekolah penting memiliki budaya dan kultur (Zamroni, 2011, p. 87), karena budaya tersebut untuk menjaga kerukunan disekolah. Sebagai organisasi, sekolah harus memiliki kemampuan untuk tumbuh berkembang tidak hanya dari segi akademisi namun juga hubungan sesama warga sekolah. Semua warga sekolah mampu melakukan adaptasi di berbagai lingkungan. Integrasi internal yang memungkinkan sekolah juga dapat menghasilkan individu atau kelompok yang memiliki sifat positif. Budaya sekolah yang sudah hadir sedari awal dibentuk yaitu kepercayaan nilai, upacara, simbol-simbol. Setiap sekolah memiliki komponen budaya unggulnya sendiri. Jabar (2017) menyatakan bahwa komponen budaya unggul yang teridentifikasi di SMA meliputi kerendahan hati, kesederhanaan, hormat sesama dan kasih sayang, kejujuran, kedisiplinan, efisiensi dan produktivitas kerja, ketakwaan, dan toleransi. Proses perubahan perilaku tidak terjadi dengan sendirinya melainkan ada kesengajaan yang direncanakan dan ada yang dengan sendirinya terjadi karena proses kematangan.

Setiap sekolah memiliki budayanya masing-masing. Budaya sekolah bersifat dinamis. Kondisi sekolah yang dinamis merupakan perpaduan seluruh warga sekolah yang memiliki latar belakang kehidupan sosial yang berbeda namun saling berinteraksi secara terus menerus. Kegiatan ini membentuk sistem nilai yang membudaya dan menjadi milik bersama di sekolah. Antarsekolah memiliki budaya

masing-masing seperti tanda kenangan maupun seragam.

Ada tiga budaya yang perlu dikembangkan di sekolah yaitu kultur akademik, kultur sosial budaya, dan kultur demokratis. Tradisi yang terbentuk dari rangkaian, kebiasaan dan sejarah sekolah serta memiliki cara pandang dalam memecahkan persoalan-persoalan yang ada di sekolah (Sudrajat, 2011, p. 13). Kultur akademik terlihat pada keilmuan, kedisiplinan dalam bertindak, kearifan dalam bersikap serta kepiawaian dalam berpikir berargumentasi. Kultur sosial budaya tercermin pada pengembangan sekolah. Kultur sosial meliputi suatu sikap manusia berhubungan dan berinteraksi satu dengan yang lain dalam kelompok dan susunan unit-unit masyarakat atau sosial di suatu wilayah serta kaitannya satu dengan yang lain. Kultur sosial budaya lebih menekankan pada interaksi yang berhubungan dengan orang lain khususnya di lingkungan sekolah. Kultur demokratis tercermin dalam pengambilan keputusan dan menghargai keputusan juga mengetahui secara penuh hak dan kewajiban diri sendiri, orang lain, bangsa dan negara.

Dari ketiga budaya tersebut, budaya demokrasi dapat dibangun di sekolah di dalam proses pembelajaran. Woolfolk (1998, p. 277) mengutip Vigotsky yang menyatakan bahwa belajar adalah membangun kerja sama secara sosial dalam mendefinisikan pengetahuan yang terjadi melalui pembangunan peluang-peluang secara sosial. Budaya demokrasi yang dituliskan di dalam penelitian ini fokus terhadap berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, menghargai keragaman, membiasakan musyawarah dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban di sekolah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran *jurisprudential inquiry*

dalam pendidikan kewarganegaraan telah mengembangkan budaya demokrasi siswa. Di dalam materi sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia, siswa diajak untuk melakukan apersepsi melalui gambar seorang pemilih yang dibantu panitia dalam menjalankan salah satu haknya yaitu memilih kepala daerah. Siswa diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan mengenai gambar tersebut. Selanjutnya guru memberikan kasus yang kemudian dikembangkan dengan langkah-langkah *jurisprudential inquiry*.

De Groot (2011) menuliskan bahwa terdapat lima dimensi aspek positif terhadap demokrasi dan keberagaman yaitu memahami tentang demokrasi, keragaman dan kepekaan terhadap isu sosial, kapasitas internal maupun eksternal, hubungan aktif yaitu komitmen dan koneksi. Ketersediaan untuk bertransformasi dan mampu berdialog dengan empati dan kompetensi dialogis. Siswa SMA sudah seharusnya dipupuk untuk memiliki lima dimensi tersebut. Suyato (2016) menyatakan bahwa belajar demokrasi sangat tergantung dengan kondisi kontekstual baik global, nasional maupun lokal.

Misi pendidikan kewarganegaraan menyiapkan warga negara yang dikehendaki sistem politik demokrasi ke upaya penyiapan tenaga kerja yang bersifat global. Secara konteks lokal budaya sekolah yang kondusif merupakan prasyarat untuk belajar demokrasi secara efektif. Tujuan materi demokrasi adalah siswa diharapkan turut serta menegakkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan menyadari dan menjaga hak dan kewajiban sebagai seorang siswa serta hak dan kewajiban orang lain disekitarnya. Tantangan generasi milenial mengenai demokrasi merupakan persoalan yang seharusnya di selesaikan dengan bijak.

Winataputra (2015, p. 282) menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan mengembangkan misi multidimensional *citizenship*. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu determinan kehidupan yang demokratis berdasarkan Pancasila. Menanamkan pendidikan demokrasi dapat dilakukan disekolah dengan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sudah harus mengarah pada pembinaan *desirable personal qualities*. Dalam hal ini, konteks demokrasi yaitu pembinaan pada perasaan dan kemauan memiliki kompetensi *civic participatory* (partisipasi politik) serta berbudaya *civic culture* (Setiawan, 2014, p. 141). Budaya demokrasi merupakan sikap menerima pluralisme sebagai suatu realita. Keberagaman merupakan kenyataan dan bukan permasalahan (Wilujeng, 2014, p. 154). Jika demokrasi hanya dipandang sebagai sebuah proses politik yang hanya mengelola kepentingan akan menghadirkan konflik. Sistem yang harus ditopang oleh demokrasi sebagai budaya demokrasi harus berlandaskan Pancasila.

Penelitian Lesilolo, Zamroni, & Suyata (2015) menunjukkan bahwa sekolah memberikan kebebasan kepada siswa, karena siswa memiliki keunggulan dan kapasitas. Siswa seharusnya dibiarkan menjadi sesuatu yang mereka pikirkan, rasakan, hadirkan, dan lakukan sehingga siswa menjadi mandiri, terinsiprasi dalam mengeksplorasi kreativitas dan imajinasi. Praktik kebebasan siswa dapat dilakukan dalam budaya demokratis di sekolah, karena budaya demokratis dapat berperan sebagai tenaga penggerak dalam ruang pembelajaran demokrasi sehingga interaksi, relasi, dan perilaku kebebasan siswa tetap teratur secara demokratis, dan praktik kebebasan siswa yaitu, kebebasan akademik dengan kontrol sosial dan menerapkan kegiatan belajar mandiri.

Proses pembelajaran perencanaan yang matang sangat penting untuk mewujudkan budaya demokrasi. Perencanaan yang harus dilakukan adalah menyusun materi pelajaran, memilih penggunaan media pembelajaran, memilih penggunaan pendekatan dan metode pembelajaran serta mempersiapkan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan (Majid, 2008, p. 17).

Tujuan pembelajaran yaitu upaya membekali siswa dengan kemampuan-kemampuan yang bersifat pengalaman, pemahaman moral dan keterampilan sehingga mengalami perkembangan positif. Untuk menyempurnakan perencanaan pembelajaran, guru memilih model pembelajaran yang sesuai dengan materi dan capaian yang diinginkan. Model pembelajaran yang sesuai untuk membangun budaya demokrasi di sekolah yaitu *jurisprudential inquiry*.

Model pembelajaran *jurisprudential inquiry* dipelopori oleh Donald Oliver dan James P. Shaves ini didasarkan pada pemahaman masyarakat bahwa setiap orang berbeda pandangan dan prioritas satu sama lain, dan nilai-nilai sosialnya saling berkonfrontasi satu sama lain (Uno, 2009, p. 30). Berdasarkan hasil telaah konseptual di atas menunjukkan bahwa budaya demokrasi di sekolah dibutuhkan untuk mewujudkan warga negara yang demokratis, pendidikan menjadi tombak untuk memberikan pemahaman dasar mengenai demokrasi. Memiliki rasa hormat dan tanggung jawab menjaga keharmonisan hubungan antar etnis, memiliki sikap kritis terhadap realitas sosial, budaya dan politik maupun agama, mitologi dan kepercayaan. Sikap kritis ini juga perlu dijaga dengan menghargai sebuah perbedaan pendapat. Warga negara yang demokratis juga mampu meminimalisir konflik yang ditimbulkan

dari perbedaan melalui ruang untuk berdiskusi dan berdialog. Serta memiliki sifat terbuka, rasional dan jujur. Untuk itu model pembelajaran *jurisprudential inquiry* dibangun di SMA Labschool Jakarta melalui pendidikan kewarganegaraan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tertulis bahwa pendidikan wajib memegang beberapa prinsip yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. Proses pembelajaran *jurisprudential inquiry* menunjukkan bahwa budaya demokratis juga dapat dilakukan pada saat proses pembelajaran. Penanaman nilai-nilai demokratis diberikan melalui isu-isu maupun kasus-kasus yang ada. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan pendapatnya tanpa membedakan tingkatan prestasi dan keaktifan.

Di dalam model pembelajaran *jurisprudential inquiry* dipelopori oleh Donald Oliver dan James P. Shaves terdapat penjelasan bahwa perbedaan pemahaman dapat menimbulkan sikap saling menghargai diantara siswa dan guru. Dengan model pembelajaran *jurisprudential inquiry* dibangun dengan dialog yang mungkin akan terjadi situasi kurang demokratis dengan pandangan kritis. Namun di sinilah peran guru yang dibuktikan oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI IPA 2 dan IPS 2 untuk memainkan peran pemimpin dan bertanggung jawab menjadikan debat solid dan isu dieksplorasi secara baik.

Budaya demokratis di sekolah juga dapat terwujud melalui model pembelajaran *jurisprudential inquiry* di dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Lesilolo, Zamroni, & Suyata, 2015). Tujuan model *jurisprudential inquiry* yaitu untuk melatih peserta didik agar mampu mengaplikasikan nilai sosial terhadap

sikap kebijakan; melatih kemampuan analogi untuk mengeksplorasi isu; dan melatih kemampuan untuk mengidentifikasi serta memecahkan definisi, fakta, dan nilai-nilai dalam masalah. Kemampuan untuk melakukan dialog yang dinamis dengan orang lain adalah hasil lain yang juga terbilang penting. Model ini juga mendidik kapasitas pengikutsertaan sosial dan merangsang hasrat tindakan sosial. Kelebihan model pembelajaran *jurisprudential inquiry* memotivasi siswa untuk aktif menganalisis sebuah kasus sehingga tidak mudah menentukan sikap dan menyimpulkan tanpa dasar. Memotivasi siswa untuk berdebat aktif dan memberi argumen logis dan rasional sehingga meningkatkan kemampuan verbal mereka. Model ini juga mengembangkan keterbukaan dan menghargai perbedaan pendapat dan mengembangkan pengetahuan dan wawasan siswa tentang sebuah kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran *jurisprudential inquiry* menunjukkan adanya keaktifan dalam berdiskusi dan memberikan pendapat tanpa adanya diskriminasi. Saling menghargai antarsiswa dapat ditunjukkan dengan perbedaan pro maupun kontra. Pendapat yang diberikan antarsiswa menunjukkan bahwa mereka menghargai dengan mendengarkan dan tidak memotong pendapat satu sama lain. *jurisprudential inquiry* atau penelitian hukum atau disebut juga dengan telaah jurisprudensial merupakan salah satu dari model pembelajaran sosial.

Model ini sangat cocok jika diterapkan dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Melalui model *jurisprudential inquiry* siswa dilatih untuk merespons kebijakan-kebijakan sosial dan dilatih untuk berkeaktifan dalam pembelajaran sehingga tercipta proses

pembelajaran yang menyenangkan. Prestasi akademik kelompok siswa yang diberikan dengan strategi inkuiri lebih tinggi dengan yang dibelajarkan dengan pembelajaran tradisional atau metode ceramah. Efek tersebut juga dirasakan oleh siswa SMA Labschool Jakarta dalam melaksanakan model pembelajaran *jurisprudential inquiry*. Siswa lebih partisipatif dalam proses pembelajaran, saling menghargai setiap keputusan baik pro maupun kontra serta memahami hak dan tanggung jawabnya di lingkungan sekolah. Untuk mengaplikasikan model pembelajaran *jurisprudential inquiry* dengan baik diperlukan model sosial. Model sosial yang paling dominan dan banyak digunakan oleh gurur di sekolah adalah *mutual trust* dan norma atau tata tertib.

Kedua model tersebut dapat juga dijadikan sebagai landasan untuk membangun budaya demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Guru PKn Kelas XI IPS 2 memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkritik dan memberikan saran kepada guru mengenai proses pembelajaran. Hal tersebut termasuk ke dalam proses budaya demokrasi. Ketika ada kekurangan, guru siap menerima masukan tersebut. Budaya demokrasi ini bukan hanya dilakukan oleh siswa melainkan juga oleh guru. Untuk itu diperlukan *moral feeling* dan *moral behaviour*.

Francisca dan Ajsuksmo (2015) menyatakan bahwa guru juga harus memiliki *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral behaviour* pada proses pembelajaran. Hal tersebut terbukti pada saat proses pembelajaran menggunakan model *jurisprudential inquiry*. Untuk menentukan isu diperlukan pemahaman guru mengenai materi yang disampaikan. Guru juga harus mampu membuat suasana menjadi nyaman. Model *jurisprudential inquiry* membantu peserta didik belajar berpikir

kritis sistematis, bersikap toleran, peduli dan mampu menentukan posisi sikap terhadap berbagai kontroversi isu-isu kontemporer kebijakan publik yang sedang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Sumarno, 2015).

Penelitian ini berdampak kepada siswa dalam mempelajari materi demokrasi. Budaya demokrasi merupakan implementasi dari hasil pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Model pembelajaran *jurisprudential inquiry* ini layak untuk diimplementasikan dalam proses pembelajaran PKn sebagai inovasi pembelajaran untuk mengembangkan budaya demokrasi di SMA.

SIMPULAN

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tertulis bahwa pendidikan wajib memegang beberapa prinsip yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemik dengan sistem yang terbuka dan multimakna. Pentingnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memberikan tantangan kepada guru untuk terus berinovasi dalam memberikan pembelajaran yang meningkatkan kritis siswa. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tana air. Untuk itu, membangun budaya demokrasi di sekolah menjadikan salah satu misi terciptanya cita-cita Pendidikan Kewarganegaraan.

Proses pembelajaran yang seringkali bertumpu pada *teacher center* dan lebih banyak menggunakan strategi menghafal mengharuskan guru memberikan model

pembelajaran yang bervariasi. Beberapa hasil penelitian secara konseptual menunjukkan pembelajaran model *Jurisprudential Inquiry* menunjukkan siswa mudah memahami baik teori dan dapat mengimplementasikannya. Secara konteks lokal budaya sekolah yang kondusif merupakan prasyarat untuk belajar demokrasi secara efektif. Untuk menyempurnakan perencanaan pembelajaran, guru memilih model pembelajaran yang sesuai dengan materi dan capaian yang diinginkan. Kultur demokratis tercermin dalam pengambilan keputusan dan menghargai keputusan juga mengetahui secara penuh hak dan kewajiban diri sendiri, orang lain, bangsa dan negara.

Model pembelajaran ini dilakukan dengan enam tahapan yaitu melakukan orientasi kasus yang sesuai dengan materi pembelajaran; mengidentifikasi isu dalam kasus; mengambil posisi terhadap kasus; menjelajahi argumen yang mendasari posisi yang diambil, jika pro maka siswa wajib menjelaskan alasan memilih pro; menetapkan posisi pilihan dan kualifikasi; dan pengujian argumen dengan fakta-fakta, definisi dan konsekuensi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran *Jurisprudential Inquiry* dalam pendidikan kewarganegaraan telah membangun budaya demokrasi siswa SMA Labschool Jakarta khususnya kelas XI IPA 2 dan IPS 2. Guru memberikan model pembelajaran menggunakan tahap-tahap *jurisprudential inquiry* yang dimulai dengan orientasi kasus. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PKn dibutuhkan inovasi yang mudah diterima baik siswa maupun guru. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi elemen penting dalam mewujudkan warga negara yang cerdas secara literasi namun juga memiliki keterampilan dan menjadi warga

negara yang demokratis. Oleh karena itu, *Jurisprudential Inquiry* merupakan model pembelajaran yang sesuai untuk mata pelajaran PKn.

Berdasarkan kajian konseptual menunjukkan bahwa model pembelajaran *Jurisprudential Inquiry* memberikan dampak positif terhadap proses pembelajaran PKn siswa SMA terutama dalam berpikir kritis dan menentukan pilihan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa model *Jurisprudential Inquiry* dapat membangun demokrasi siswa ditunjukkan dengan siswa ikut berpartisipasi aktif di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah, siswa mampu menghargai setiap keputusan yang diambil oleh siswa lainnya dalam setiap argumen yang diberikan oleh siswa lainnya. Siswa juga mampu memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai seorang siswa SMA. Siswa dibiasakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah. Serta siswa menjalankan tanggung jawabnya baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah dengan mentaati setiap peraturan yang ada di Sekolah.

Model pembelajaran ini dapat efektif jika kerjasama antara siswa, guru dan warga sekolah baik. Kelebihan model pembelajaran *jurisprudential inquiry* memotivasi siswa untuk aktif menganalisis sebuah kasus sehingga tidak mudah menentukan sikap dan menyimpulkan tanpa dasar. Memotivasi siswa untuk berdebat aktif dan memberi argumen logis, rasional sehingga meningkatkan kemampuan verbal mereka. Model ini juga mengembangkan keterbukaan dan menghargai perbedaan pendapat dan mengembangkan pengetahuan dan wawasan siswa tentang sebuah kasus.

DAFTAR PUSTAKA

Agusta, L. (2013). Politik demokrasi tanpa budaya demokrasi. *Pidato Kebudayaan*.

- Uno, H. B. (2009). *Model pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed*. (Terj.: A. Fawaid). Thousand Oaks, California: Sage Publications.
- Fatarina, N., Holilulloh, H., & Adha, M. M. (2014). Pengaruh penerapan budaya demokrasi di lingkungan sekolah terhadap pembentukan civic skills. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 2(4).
- Francisca, L., & Ajisuksmo, C. R. P. (2015). Keterkaitan antara moral knowing, moral feeling, dan moral behavior pada empat kompetensi dasar guru. *Jurnal Kependidikan*, 45(2), 211-221.
- De Groot, I. (2011). Why we are not democratic yet: The complexity of developing a democratic attitude. In W. Veugelers (Ed.), *Education and humanism: Linking autonomy and humanity* (pp. 79-94). Rotterdam: Sense Publishers.
- Ianun, R. (2007). *Persepsi siswa SMA Muhammadiyah 1 Bantul terhadap ekstrakurikuler bolavoli* (Skripsi tidak diterbitkan). FIK Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Jabar, C. S. A. (2017). Komponen budaya sekolah unggul. *Jurnal Kependidikan*, 1(2), 277-290.
- Japar, M. (2017). Jurisprudential inquiry sebagai model pembelajaran alternatif untuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 27(1).
- Joyce, B. (2003). *Models of teaching*. New Delhi : Prentice-Hall of India.
- Kardiman, Y. (2016). *Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan untuk SMA/MA kelas XI*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Majid, A. (2008). *Perencanaan pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasana, D. (2012). *Pendidikan bermutu dan berdaya saing*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lesilolo, H. J., Zamroni, Z., & Suyata, S. (2015). Kebebasan siswa dalam budaya demokratis di sekolah (Studi multi kasus di SMA Yogyakarta). *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 3(1), 11-18.
- Prihandoko, Y., Slamet, St. Y., & Winarno. (2017). Pendekatan cognitive moral sebagai kerangka pengembangan bahan ajar pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. *Jurnal Kependidikan*, 1(2), 200-213.
- Sapriya, & Winataputra, U. S. (2004). Pendidikan kewarganegaraan: model pengembangan materi dan pembelajaran. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia.
- Setiawan, D. (2014). *Kapita selekta kewarganegaraan*. Medan: Cahaya Ilmu Press.
- Sudrajat, A. (2011). *Kurikulum dan pembelajaran dalam paradigma baru*, Yogyakarta: Paramita Production.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarno, S. (2015). Strategi pembelajaran model inkuiri jurisprudensi untuk pendidikan pancasila dan kewarganegaraan di sekolah menengah atas. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 28(1).
- Suyato. (2016). Belajar demokrasi di sekolah: Re-orientasi pendidikan dan pengembangan kultus sekolah yang humanis. *Jurnal Civics*, 13(1).
- Trianto. (2007). *Model-model pembelajaran inovatif berorientasi konstruktivistik*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

- Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia.
Wilujeng, S. R.(2014). Meningkatkan kua-
litas kehidupan berbangsa. *Humanika*,
19(1), 145-157.
- Winataputra, U.S. (2015). *Pendidikan
kewarganegaraan: Refleksi historis
epistemologis dan rekonstruksi untuk
masa depan*. Banten: Universitas
Terbuka.
Woolfolk, A.E.(1998).*Educational psy-
chology* (7th.ed.).Boston, MA: Allyn
& Bacon.
Zamroni. (2011). *Dinamika peningkatan
mutu*. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.